

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Stunting saat ini menjadi salah satu masalah kesehatan terbesar di Indonesia. Dari 151 negara yang mengalami masalah stunting di dunia, Indonesia berada di peringkat 115 dengan masalah stunting.<sup>1</sup> Menurut *World Health Organization* (WHO) stunting ialah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang terdapat pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yakni kurang dari 50 cm.<sup>2</sup> Kondisi dimana terdapatnya kekurangan gizi pada anak di 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Karena mengalami kekurangan gizi ini, bayi stunting biasanya tumbuh lebih pendek dari standar tinggi balita seumurannya.<sup>3</sup> Sehingga, saat ini stunting menjadi salah satu dari banyaknya permasalahan gizi yang menjadi perhatian pemerintah, dikarenakan berdampak terhadap perkembangan ekonomi dan produktivitas generasi muda.

Menurut data stunting di Indonesia, bayi Indonesia ketika lahir, sebanyak 23% anak tersebut sudah mengalami kondisi stunting.<sup>4</sup> Dimana panjang badan

---

<sup>1</sup> Fina Aura Regita, Ananta Prathama, 2023, Peran pemerintah desa dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, Vol. 12, No. 1, hlm 29-30

<sup>2</sup> Desi Fajar Susanti, 2022, Mengenal apa itu stunting, *Kemkes.go.id*, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan ([kemkes.go.id](http://kemkes.go.id))

<sup>3</sup> Ni Ketut Aryastami, Ingan Tarigan, 2017, Policy Analysis on Stunting Prevention in Indonesia, *Buletin Penelitian Kesehatan*, Vol. 45, No. 4, hlm 233-234

<sup>4</sup> [wecare.id](http://wecare.id), 2022, Negara dengan angka stunting tertinggi di dunia, *blog.wecare.id*, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023, Negara dengan Angka Stunting Tertinggi di Dunia - [WeCare.id](http://wecare.id)

mereka rata-rata dibawah 48%. Sementara itu, sisanya 77% berada pada kondisi stunting setelah lahir. Sehingga pemerintah berusaha membuat intervensi penurunan stunting, yaitu sebelum lahir dan sesudah kelahiran anak.

Pembangunan, pada dasarnya tidak hanya berfokus pada pembangunan secara fisik atau infrastruktur negara saja, tetapi pembangunan masyarakat sebagai sumber daya yang hidup dalam sebuah negara juga menjadi perhatian yang harus diutamakan oleh pemerintah. Pembangunan sumber daya manusia tidak hanya berfokus kepada sistem pendidikan yang ada, tetapi juga peningkatan taraf hidup yang lebih baik dan layak, kemajuan secara sosial dan ekonomi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia juga dilihat dari tingkat kesehatan masyarakat, baik secara gizi, mental, dan juga fisik. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya ada peran pemerintah selaku pemegang peranan terpenting dalam menyejahterakan masyarakatnya.<sup>5</sup>

Pada dasarnya tidak hanya pemerintah yang berperan sebagai pemegang peranan terpenting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melainkan juga terdapat peran penting dari sektor lain yang menjadi *stakeholder* dalam permasalahan kesehatan masyarakat di Indonesia terkhususnya masalah stunting. Sehingga diperlukan kolaborasi antara pemerintah dengan sektor terkait untuk mewujudkan kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan dalam

---

<sup>5</sup> Hayati Sofia Salmon, Donald K. Moninjta, Neni Kumayas, 2022, Strategi pemerintah dalam mengatasi stunting di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Studi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sangihe), *Jurnal Governance*, Vol. 2, No. 2, hlm 2-3

masyarakat, serta adanya tata kelola pemerintahan yang baik dalam menurunkan angka stunting di Kota Padang.

Soepomo berpendapat bahwa istilah *good governance* adalah pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya dan berakuntabel terhadap publik secara profesional, transparan, bertanggung jawab, dan adil.<sup>6</sup> Untuk mewujudkannya adalah dengan cara memberantas KKN dan memperbaiki kinerja pemerintah. Kemudian menurut Sadjijono, *good governance* mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara.<sup>7</sup>

*United Nations Development Programme* (UNDP) mengemukakan bahwa *governance* adalah bentuk pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan masalah yang dihadapi suatu bangsa dengan melibatkan semua sektor.<sup>8</sup> Sehingga *good governance* atau diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik merupakan nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional untuk kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, *Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses

---

<sup>6</sup> Nelsin Dunggio, Lisda Van Gobel, Rukiyah Nggilu, 2023, *Transparency in Government Governance by the Head of Bubalango Village, East Sumalata District, North Gorontalo Regency, Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR)* Vol.2, No. 10, hlm 1410

<sup>7</sup> Sundari Rahman, Musmuliadi, 2021, Integrasi *Good Attitude* dan *Excellent Service* dalam Mewujudkan *Good Government Governance*, *Balanca Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, hlm 27

<sup>8</sup> Novianti Leny, 2015, *Public Sector Governance* Pada Pemerintah Daerah, Pekanbaru, hlm 47-53



pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama.

Stunting menjadi permasalahan utama gizi yang berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Saat ini, menurunnya angka stunting menjadi fokus utama pemerintah Indonesia di tahun 2024.<sup>9</sup> Di Kota Padang, saat ini pemerintah berupaya dalam melakukan penurunan angka stunting sejak tahun 2021 hingga tahun 2022. Namun pada faktanya saat ini angka stunting di Kota Padang terus meningkat dan belum terlihat adanya penurunan secara drastis.<sup>10</sup> Sehingga dengan hal tersebut, diperlukan adanya kolaborasi antara pemerintah dengan sektor terkait seperti masyarakat, forum remaja, pengusaha dan pihak swasta lainnya untuk bekerjasama dalam menurunkan angka stunting di Kota Padang.

Penelitian mengenai stunting serta upaya pemerintah dalam penurunan angka stunting sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, diantaranya Defi Permatasari<sup>11</sup>, Allya Tsamarah Yunifar, Bambang Kusbandrijoa, Anggaeny Puspaningtyas<sup>12</sup>, Evalia Nuranita Putri, Herbasuki Nurcahyanto<sup>13</sup>,

---

<sup>9</sup> Rima Kurniati, 2023, Prevelensi angka stunting di Padang 19,6 persen, ditargetkan turun 2 persen selama 2023. Padang.tribunnews.com, diakses pada tanggal 14 September 2023, Prevalensi Angka Stunting di Padang 19,6 Persen, Ditargetkan Turun 2 Persen Selama 2023 - Tribunpadang.com (tribunnews.com)

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Defi Permatasari. 2023, Penerapan Prinsip-Prinsip Sustainable Development Goals (SDGs): Strategi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam Mengatasi Stunting Periode 2018-2022. *Skripsi*, Padang: Universitas Andalas, hlm 69-88

<sup>12</sup> Allya Tsamarah Yunifar, Bambang Kusbandrijo. 2022, Anggaeny Puspaningtyas, Collaborative Governance Pada Penerapan Perwali No 79 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya, *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 4, hlm 258-259

<sup>13</sup> Evalia Nuranita Putri, Herbasuki Nurcahyanto. 2021, Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting di Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol. 10. No. 2, hlm 5-7

Sukanti, Nurfaidati<sup>14</sup>, Retnaning Muji Lestari, Diah Winatasari<sup>15</sup>, Hayati Sofia Salmon, Donald K. Monintja, Neni Kumayas, dan Natasya Salsabilla Festy.

Dari berbagai penelitian tersebut, penelitian mengenai upaya pemerintah dalam penurunan angka stunting ternyata belum banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Peneliti belum menemukan penelitian yang menganalisis upaya dan kendala dalam penurunan angka stunting oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah stunting sebagai salah satu sasaran dalam membentuk pertumbuhan masyarakat yang dinamis di Kota Padang. Hal tersebut menjadi kebaruan dalam penelitian ini. Kontribusi masing-masing penelitian yang telah disebutkan sebelumnya sebagai rangka bahan untuk menyusun *state of the art*, yakni terkait kumpulan teori dan referensi, baik yang mendukung ataupun tidak mendukung penelitian peneliti.

Penulis melakukan penelitian yang kemudian diberi judul “Upaya dan Kendala Pemerintah Kota Padang dalam Penurunan Angka Stunting Pada Tahun 2022” berangkat dari stunting yang menjadi masalah utama kesehatan masyarakat saat ini terutama pada anak yang harus segera ditangani oleh berbagai pihak. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan konsep *good governance* menurut *United Nations Development Programme (UNDP)* untuk mengetahui apa saja upaya dan kendala pemerintah dalam penurunan angka stunting di Kota Padang tahun 2022. Sebagaimana yang sudah dijelaskan

---

<sup>14</sup> Sukanti, Nur Faidati. 2021, Collaborative Governance dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Sleman, *Jurnal Caraka Prabhu*, Vol. 5, No. 1, hlm 100-105

<sup>15</sup> Retnaning Muji Lestari, Diah Winatasari. 2023, Peranan Pemerintah Desa Kadirejo dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2021, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Ar-Rum Salatiga*, Vol 8 No 1, Salatiga, hlm 22-25

sebelumnya, berdasarkan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 bahwa semenjak 2 tahun terakhir dari 2021 hingga 2022 angka stunting di Kota Padang belum mengalami penurunan, sehingga diperlukan tindakan dan kerjasama semua pihak dalam menurunkan angka stunting di Kota Padang.

Maka dari itu, upaya pemerintah dalam penurunan angka stunting di Kota Padang menjadi penting untuk diketahui sebagai langkah strategis untuk menciptakan manajemen pemerintahan yang baik, dengan hubungan dinamis dan sinergis dalam penurunan angka stunting. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud menjelaskan upaya dan kendala pemerintah dalam penurunan angka stunting di Kota Padang.

## 1.2 Rumusan Masalah

Stunting ialah sebuah kondisi dimana tinggi badan seorang anak ternyata lebih pendek dibandingkan tinggi badan anak seusianya atau orang lain pada umumnya. Stunting merupakan hambatan pertumbuhan yang diakibatkan oleh kekurangan gizi pada anak sejak dini. Stunting ini berdampak kepada adanya kemunduran tingkat kecerdasan pada anak, perkembangan psikomotorik dan motorik, serta juga dapat menurunkan kemampuan dari segi kesehatan pada anak ketika saat sudah dewasa.<sup>16</sup>

Stunting tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi juga terdapat faktor lain yang saling mempengaruhi. Dimana faktor ini dapat dilihat sejak dalam kandungan dan setelah melahirkan. Pertumbuhan yang kurang baik di

---

<sup>16</sup> Yuniar Rosmalina, Erna Luciasari, Aditianti, Fitrah Ernawati, 2018, Upaya pencegahan dan penanggulangan batita stunting: Systematic Review, *Journal of the Indonesia Nutrition Association*, Vol. 41, No. 1, hlm 1



dalam kandungan dipengaruhi oleh faktor kesehatan serta gizi semasa kandungan.<sup>17</sup> Pada masa kehamilan, ibu memerlukan asupan gizi yang baik untuk menunjang pertumbuhan serta perkembangan janin yang optimal untuk mencegah terjadinya stunting. Misalnya, mengonsumsi makanan yang mengandung protein hewani seperti ikan, telur, buah, sayur, dan lainnya.<sup>18</sup>

Berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO), terdapat 149,2 juta anak mengalami stunting pada tahun 2020 di dunia atau setara dengan 22%.<sup>19</sup> Sedangkan saat ini prevalensi angka stunting di Indonesia jika dilihat dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, angka stunting di tahun 2022 yakni 21,6%. Dimana angka ini mengalami penurunan dari tahun 2021 yang berjumlah 24,4%.<sup>20</sup> Hal ini menjadi suatu kabar baik dimana menurunnya angka stunting di Indonesia menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menanggulangi dampak stunting untuk menuju perubahan yang lebih baik di bidang kesehatan masyarakat. Meskipun prevalensi angka stunting mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, angka stunting di Indonesia masih

---

<sup>17</sup> Novita Agustina, 2022, Faktor-faktor penyebab kejadian stunting pada balita, *yakes.kemkes.go.id*, diakses pada tanggal 31 Oktober 2023, [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/1529/faktor-faktor-penyebab-kejadian-stunting-pada-balita](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1529/faktor-faktor-penyebab-kejadian-stunting-pada-balita)

<sup>18</sup> Gerung, 2023, Gerakan gemar makan ikan, telur, buah, dan sayur, guna meningkatkan gizi dan pencegahan stunting, *diskapang.ntbprov.go.id*, diakses pada tanggal 15 November 2023, <https://diskapang.ntbprov.go.id/detailpost/gerakan-gemar-makan-ikan-telur-buah-dan-sayur-guna-meningkatkan-gizi-dan-pencegahan-stunting#:~:text=Ada%20banyak%20jenis%20makanan%20yang,kesehatan%20jantung%20dan%20fungsi%20otak>

<sup>19</sup> Jessica Deviana, 2022, Permasalahan Stunting di Indonesia dan Penyelesaiannya, *djkn.kemenkeu.go.id*, diakses pada tanggal 15 November 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/16261/Permasalahan-Stunting-di-Indonesia-dan-Penyelesaiannya.html>

<sup>20</sup> Sehat negeriku, 2023, Prevalensi stunting turun di Indonesia turun ke 21,6% dari 24,4%, *sehatnegeriku.kemkes.go.id*, diakses pada tanggal 31 Oktober 2023, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/>

dikategorikan tinggi karena berada diatas (>20%) yang menjadikan stunting sebagai masalah kesehatan pada masyarakat.

Menurut data prevelensi stunting di Sumatera Barat, terdapat beberapa daerah yang masih memiliki prevelensi angka stunting yang cukup tinggi. Salah satunya ialah Kota Padang, dengan urutan ke 12 di tahun 2022 dengan jumlah angka stunting 19,5%.<sup>21</sup> Angka stunting Sumatera Barat pada tahun 2021 sebesar 23,3% sudah berada di bawah rata-rata nasional. Namun, pada tahun 2022 mengalami kenaikan 1,9% menjadi 25,2%, sehingga saat ini berada di atas rata-rata nasional, yaitu 21,6%.<sup>22</sup> Berikut data persebaran jumlah angka stunting di Sumatera Barat tahun 2022.

**Tabel 1.1**  
**Data Perbandingan Presentase Angka Stunting di Sumatera Barat Tahun 2021-2022**

No	Daerah	Presentase Angka Stunting 2021	Presentase Angka Stunting 2022
1.	Kabupaten Pasaman Barat	24,0%	35,5%
2.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	27,3%	32,0%
3.	Kabupaten Solok Selatan	24,5%	31,7%
4.	Kabupaten Sijunjung	30,1%	30,2%
5.	Kabupaten Pesisir Selatan	25,2%	29,8%
6.	Kabupaten Pasaman	30,2%	28,9%
7.	Kabupaten Padang Pariaman	28,3%	25,0%
8.	Kabupaten Dharmasraya	19,5%	24,6%
9.	Kabupaten Agam	19,1%	24,6%
10.	Kabupaten Lima Puluh Kota	28,2%	24,3%
11.	Kabupaten Solok	40,1%	24,2%

<sup>21</sup> Cindy Mutia Annur, 2023, Ini wilayah dengan prevelensi stunting tertinggi di Sumatera Barat pada 2022, *databoks*, diakses pada tanggal 14 September 2023, Ini Wilayah dengan Prevalensi Stunting Tertinggi di Sumatra Barat pada 2022 (katadata.co.id)

<sup>22</sup> *Ibid*



<b>12. Kota Padang</b>	<b>18,9%</b>	<b>19,5%</b>
13. Kabupaten Tanah Datar	21,5%	18,9%
14. Kota Pariaman	20,3%	18,4%
15. Kota Solok	18,5%	18,1%
16. Kota Payakumbuh	20,0%	17,8%
17. Kota Padang Panjang	20,0%	16,8%
18. Kota Bukittinggi	19,0%	16,8%
19. Kota Sawah Lunto	13,7%	13,7%

*Sumber: Data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022*

Kita tahu bahwa permasalahan stunting bukan menjadi masalah biasa yang semata-mata harus diabaikan begitu saja. Dimana hal ini tentunya menjadi penentu untuk menciptakan generasi yang unggul dari segi sumber daya manusia, sehat secara jasmani dan rohani, dan mampu memberikan perubahan yang baik untuk Indonesia. Namun, berhadapan dengan fenomena ini, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan sektor terkait dalam mengatasi dan mengurangi secara terus menerus jumlah angka stunting di Indonesia.

Di Kota Padang, hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting tahun 2022 sebesar 19,5% dan pada tahun 2021 sebesar 18,9%. Berdasarkan hasil data diatas, angka stunting di Kota Padang pada tahun 2022 mengalami kenaikan 0,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Saat ini terdapat 1002 orang anak yang terkena stunting di Kota Padang, sehingga Pemerintah Kota Padang menargetkan bahwa penurunan angka stunting di tahun ini yakni sebanyak minimal 2% dari target pemerintah untuk stunting di Indonesia tahun 2024 turun sebanyak 14%.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Rima Kurniati, 2023, Prevelensi angka stunting di Padang 19,6 persen, ditargetkan turun 2 persen selama 2023, [tribunpadang.com](http://tribunpadang.com), diakses pada tanggal 19 September 2023,

**Tabel 1. 2**  
**Data Presentase Angka Stunting di Kota Padang dari tahun 2021-2022**

Tahun	Presentase
2021	18,9%
2022	19,5%

*Sumber: Data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022*

Berdasarkan hasil data diatas, dengan masih tingginya angka stunting di Kota Padang, tentunya menjadi tugas bagi pemerintah dalam mewujudkan turunnya prevelensi angka stunting di Kota Padang. Namun, untuk hal ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja dalam menuntaskan kasus ini, tetapi juga menjadi tanggung jawab dan butuh perhatian khusus dari *stakeholder* lainnya terutama masyarakat yang tidak hanya menjadi objek, tetapi juga menjadi subjek untuk dapat membantu penurunan angka stunting di Kota Padang.

Naiknya angka stunting di Kota Padang pada tahun 2021 hingga 2022 dengan presentase 0,6%, tentunya memiliki penyebab serta kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam penurunan angka stunting di Kota Padang. Dibandingkan dengan 19 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat, Kota Padang menjadi salah satu daerah yang tidak mengalami penurunan angka stunting semenjak 2 tahun terakhir. Sehingga hal ini menjadi salah satu acuan bagi pemerintah untuk dapat menurunkan angka stunting di tahun berikutnya dengan melihat kendala-kendala yang ada sebagai bahan perbaikan dalam

proses percepatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan *stakeholder* terkait.

Meskipun pemerintah telah berupaya dalam melakukan intervensi penurunan stunting di Kota Padang dengan memberikan Bantuan Makanan Tambahan (BMT), Posyandu rutin, sosialisasi bahaya stunting, serta upaya lainnya, peneliti menemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab meningkatnya kasus stunting di Kota Padang tahun 2022. Diantaranya adalah faktor ekonomi, stunting terjadi karena ketidakmampuan orangtua dalam memenuhi asupan gizi anak yang dimulai hingga semenjak masa kehamilan. Selain itu, kurangnya literasi dan pengetahuan dari ibu hamil yang enggan mendatangi tempat pelayanan kesehatan.<sup>24</sup>

Tidak hanya itu, meningkatnya angka stunting di Kota Padang pada tahun 2022 juga disebabkan oleh kurangnya edukasi yang diperoleh oleh masyarakat terhadap bahayanya stunting dan faktor-faktor penyebab dari stunting. Sehingga hal inilah yang menjadi faktor penyebab serta kendala pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Kota Padang tahun 2022.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Manajer program dan kegiatan satgas stunting Kota Padang, Mardiansyah menyebutkan bahwa:<sup>25</sup>

“...karena memang pada tahun 2022 itu, tahun pertama realisasi dari Perpres No 72 Tahun 2021, sehingga perhatian dari seluruh

---

<sup>24</sup> Wan Rais, 2022, Ekonomi salah satu penyebab stunting di Kota Padang, [padang.go.id](https://www.padang.go.id), diakses pada tanggal 12 Maret 2024, <https://www.padang.go.id/ekonomi-salah-satu-penyebab-stunting-di-kota-padang>

<sup>25</sup> Wawancara dengan Mardiansyah selaku Manajer Program dan Kegiatan Satgas Stunting Kota Padang, di Kantor BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 13 Maret 2024 Pukul 11.00 WIB



*stakeholder* terkait terutama pemerintah belum *full power* dan terkonsentrasi terhadap permasalahan stunting...”

Selain itu, Mardiansyah juga menyatakan:

“ jika kita lihat, ternyata di Kota Padang ini partisipasi posyandunya itu sangat kurang, partisipasi posyandu itu, kedatangan balita datang ke posyandu ini sangat rendah. Kenapa rendah, ya banyak faktor yang memang karena disini Kota, orang sibuk bekerja, jadi anak itu tidak dibawa ke posyandu, dan anak dibawa langsung ke dokter.”

Dari pernyataan tersebut kendala pemerintah dalam penurunan angka stunting di Kota Padang pada tahun 2022, disebabkan oleh fokus pemerintah dalam penurunan angka stunting di Kota Padang belum *full power* dan terkonsentrasi dengan baik. Hal ini dikarenakan, pada tahun tersebut merupakan tahun pertama realisasi setelah munculnya Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting. Sehingga, realisasi tersebut tidak berjalan maksimal dan belum terfokus kepada penanganan dan penurunan angka stunting.

Selain itu, penyebab lain dari meningkatnya angka stunting ini disebabkan oleh minimnya partisipasi orang tua atau masyarakat untuk membawa anak atau balitanya ke posyandu dengan alasan sibuk bekerja, dan menganggap bahwa ketika anak sakit, langsung dibawa ke rumah sakit saja. Sedangkan, dengan membawa anak ke posyandu dapat membantu orang tua untuk mencegah anaknya dari bahaya dampaknya stunting dan dapat menambah imunitas anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Tidak hanya itu, juga terdapat faktor lain yang menjadi penyebab tidak menurunnya angka stunting di Kota Padang pada tahun 2022 yang disampaikan Mardiansyah:<sup>26</sup>

“...dikarnakan pada tahun-tahun sebelumnya tidak masif dilakukan pengukuran stunting ini, ketika di tahun 2022 menjadi salah satu fokus pemerintah dan dilakukan pengukuran, sehingga angka stuntingnya menjadi tinggi. Tidak hanya itu, tingginya angka pernikahan dini, itu memang stunting yang terjadi salah satu penyebabnya yaitu maraknya orang yang menikah siri atau nikah muda.”

Faktor lainnya disebabkan oleh pengukuran yang dilakukan oleh lembaga survey tidak efektif pada tahun sebelumnya, sehingga berdampak terhadap kapasitas hasil pengukuran di tahun 2022 yang menjadi fokus pemerintah dalam percepatan dan penurunan angka stunting di Indonesia, terutama di Kota Padang. Selain itu, faktor dari tingginya angka pernikahan dini atau nikah muda, banyaknya masyarakat yang menikah siri, juga menjadi penyebab naiknya angka stunting. Hal ini dikarenakan, minimnya pengetahuan tentang asupan gizi yang harus dipenuhi ibu saat hamil dan asupan gizi anak setelah melahirkan.

Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi fokus peneliti pada penelitian kali ini ialah upaya dan kendala Pemerintah Kota Padang penurunan angka stunting tahun 2022. Mengingat angka stunting di Kota Padang pada tahun 2021 hingga tahun 2022 tidak mengalami penurunan, maka membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Padang serta Dinas terkait untuk dapat dilakukan upaya dalam penurunan angka stunting. Dengan kondisi tersebut, diharapkan adanya upaya maksimal yang dilakukan oleh pemerintah dan menjadi evaluasi dalam

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Mardiansyah selaku Manajer Program dan Kegiatan Satgas Stunting Kota Padang, di Kantor BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 13 Maret 2024 Pukul 11.00 WIB

mewujudkan penurunan angka stunting di Kota Padang pada Tahun 2023. Sehingga inilah yang menjadi alasan peneliti memilih Kota Padang sebagai lokasi penelitian.

Sehingga dengan ini, peneliti berasumsi bahwa terdapat hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam penurunan angka stunting Kota Padang. Seperti, pemberian bantuan makanan sehat untuk ibu hamil dan bayi tidak tepat sasaran dan belum dilakukan secara merata, belum terlihat adanya jaminan untuk kelangsungan hidup seperti bantuan biaya pendidikan bagi penderita stunting, kolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat masih kurang, dan lain sebagainya. Dengan adanya kendala tersebut, angka stunting di Kota Padang belum mengalami penurunan. Mengingat stunting menjadi permasalahan yang cukup kompleks, maka tidak hanya pemerintah yang berperan dalam penurunan angka stunting ini, tetapi juga diperlukan kolaborasi maksimal antara pemerintah dengan sektor terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting sebagai *leading sektor* pencegahan dan penanganan stunting.

Selain itu, Kota Padang sebagai ibu kota provinsi, yang menjadi pusat pemerintahan di Sumatera Barat seharusnya mempunyai prevalensi lebih rendah bahkan seharusnya aman akan masalah stunting jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya yang ada di Sumatera Barat. Dikarenakan Kota Padang memiliki banyak akses dan fasilitas yang dapat mendukung untuk percepatan penurunan angka stunting ini. Tetapi kenyataannya saat ini



prevelensi angka stunting di Kota Padang berada pada peringkat 12 dari 19 Kabupaten/Kota lainnya.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka pertanyaan peneliti pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Kota Padang dalam penurunan angka stunting pada tahun 2022?
2. Bagaimana Kendala Pemerintah Kota Padang dalam penurunan angka stunting pada tahun 2022?

### **1.3 Tujuan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai Upaya dan Kendala Pemerintah Kota Padang dalam penurunan angka stunting pada tahun 2022.

### **1.4 Manfaat**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu politik terkhususnya dalam melihat kinerja pemerintah dalam penurunan angka stunting. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan upaya dan kendala pemerintah dalam penurunan angka stunting di Kota Padang.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan bagi seluruh pihak terkait serta pemangku kepentingan dalam mengatasi masalah yang menjadi upaya ataupun kendala penurunan angka stunting. Sehingga mampu mencapai tujuan yang diinginkan oleh seluruh pihak terutama pemerintah dalam proses penurunan angka stunting di Indonesia.

